

CONVERGENCE OF COUNTRY-BASED STUNTING PREVENTION POLICIES IN MUNGKA DISTRICT, FIVE PULUH KOTA DISTRICT

IMPLEMENTASI KONVERGENSI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS NAGARI DI KECAMATAN MUNGKA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Monalisa Febrilianda^{1a}, Rahmadani Yusran^{2b(*)}

¹² Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^b yusranrdy@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author

yusranrdy@fis.unp.ac.id

How to Cite: febrilianda. yusran (2023). Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota doi: 10.36526/js.v3i2.

Received : 14-03-2023
 Revised : 30-06-2023
 Accepted: 13-08-2023

Keywords :

Implementation,
 Policy Convergence,
 Stunting,
 Nagari

Abstract

This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors in implementing the convergence of nagari-based stunting prevention policies in Mungka District, Fifty City District. This type of research is qualitative with a descriptive method, because research describes, tells, and hides a situation or event as it is Data Collection Techniques and Tools, namely using observation, interviews and documentation studies. While the technique used to test the validity of the data is to use triangulation techniques by finding sources that the authors get from observations, interviews and literature studies. Furthermore, the procedure in qualitative data analysis according to Miles and Huberman (in Sugiyono, 2014: 91-92) is by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study have implemented stunting prevention policies in several programs. However, it has not succeeded in realizing the policy objectives. This is due to several factors, firstly the lack of participation from the nagari government in reducing the stunting rate in Nagari Mungka, secondly, the low support from pregnant women and mothers with toddlers to participate in outreach activities provided by the nagari midwives and the last, the stunting reduction program has not yet been implemented. the organization of relations between policy implementing organizations greatly determines the level of cooperation and communication in implementing policies.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan kurang gizi yang tinggi di Indonesia adalah masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada bayi dan kekurangan gizi pada balita. Masalah kekurangan gizi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari asupan makanan yang kurang atau tidak cukup hingga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal yang menjadi penyebab langsungnya adalah kekurangan asupan gizi dan penyakit infeksi. Hal yang menjadi penyebab secara tidak langsung yaitu asupan gizi yang tidak memadai dan infeksi yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, pengasuhan yang buruk serta kebersihan dan pelayanan Kesehatan yang kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang di Indonesia tingginya angka kemiskinan, rendahnya kesehatan lingkungan yang ada, terbatasnya akses pangan pada keluarga miskin, serta belum memadainya pola asuh ibu dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar (Kemenkes RI, 2017)

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan atau melakukan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita yang sarannya kepada balita kekurangan gizi yang bertujuan untuk memulihkan gizi balita dengan jalan memberikan makanan dengan kandungan gizi yang cukup sehingga kebutuhan gizi pada balita dapat terpenuhi yang ditujukan untuk kelompok balita yang sangat rawan masalah gizi meliputi gizi buruk untuk balita yang berumur 6-59 bulan atau kurang lebih sampai umur 5 tahun (Kemenkes RI, 2017). Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pertama ialah persiapan yang terdiri dari penentuan balita sasaran, sosialisasi program serta penyuluhan. Kedua adalah pelaksanaan yang terdiri dari pendistribusian serta konseling, Ketiga yaitu pemantauan dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan terhadap balita yang bergizi buruk yang berguna untuk mengetahui perkembangan status gizi pada balita tersebut serta memastikan makanan yang dikasih dikonsumsi oleh balita tersebut. Keempat yaitu pencatatan dan pelaporan, dilakukan mulai dari orang tua balita, bidan di desa tersebut dan petugas gizi dari puskesmas yang langsung mencatat laporan yang dilaporkan ke dinas kesehatan setempat (Kemenkes RI, 2011).

Namun tingginya angka stunting di Kabupaten Lima puluh kota mendorong pemerintah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tujuan dari peraturan bupati ini adalah pertama memfasilitasi penguatan komitmen wali nagari, anggota bamus dan masyarakat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan nagari. Kemudian yang kedua memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan nagari secara demokratis dan berkeadilan sosial agar kader pembangunan manusia dan sasaran keluarga 1000 HPK mampu berpartisipasi dalam pembangunan nagari. Selanjutnya yang ketiga memfasilitasi kegiatan kegiatan pencegahan stunting sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nagari yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran nagari khususnya dana desa.

Implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Mungka dilaksanakan melalui beberapa program, seperti Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Di Nagari Mungka Tengah telah dilaksanakan pada bulan September 2021. Sumber dana program ini berasal dari Dana Desa Nagari Mungka Tengah, yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk desa. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam rangka pencegahan stunting di Nagari Mungka Tengah, pemerintah nagari menyediakan dana desa sebesar Rp 5.000.000. Dana ini diperuntukkan bagi 29 anak yang mengalami gizi buruk.. Pemerintah nagari secara langsung memberikan bahan makanan kepada balita stunting berupa susu dan biskuit. Produk susu yang diberikan disesuaikan dengan permintaan orang tua dari balita yang sudah di survey oleh pihak tertentu, seperti Bebelac, SGM, Dancow, Indomilk. Produk biskuit yang diberikan seperti Regal, Biskuit, Roma, Roma Sari Gandum, Oreo. Pemberian bahan makanan ini bertujuan untuk meningkatkan status dan kondisi gizi balita sesuai dengan usianya.

Sedangkan, di nagari Sungai Antuan, pemerintah nagari menyediakan dana desa sebesar Rp 900.000 per tahun untuk 8 balita yang mengalami gizi buruk. Bahan makanan yang diberikan Pemerintah Nagari berupa susu kepada orang tua yang anak-anaknya terkena stunting. Tujuan dari pemberian susu ini juga sama, yaitu untuk meningkatkan status dan kondisi gizi balita sesuai dengan usianya. Namun demikian, implementasi program ini belum berhasil menurunkan prevalensi stunting di daerah ini.

Penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan program pencegahan stunting di kedua Nagari ini. Penjelasan ini juga dapat dijadikan sebagai bukti mengapa jumlah stunting meningkat di Kabupaten Lima Puluh Kota umumnya, khususnya di Kecamatan Mungka.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya Teknik dan Alat Pengumpulan Data yaitu menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi dengan mencocokkan sumber yang penulis peroleh dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya, prosedur dalam analisis data kualitatif menurut Miles Dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:91-92) yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Mungka terutama di Nagari Mungka dan Sungai Antuan telah dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu dan pemberian makanan tambahan kepada anak balita yang terkena stunting. Pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah suatu upaya kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, dan anak balita serta anak pra sekolah. (Kementerian Kesehatan). Namun demikian, pelaksanaan kegiatan ini belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka pencegahan stunting di Nagari Mungka Tengah, pemerintah nagari menyediakan dana desa sebesar Rp 5.000.000. Dana ini diperuntukkan bagi 29 anak yang mengalami gizi buruk. Pemerintah nagari secara langsung memberikan bahan makanan kepada balita stunting berupa susu dan biskuit. Produk susu yang diberikan disesuaikan dengan permintaan orang tua dari balita yang sudah di survey oleh pihak tertentu, seperti Bebelac, SGM, Dancow, Indomilk. Produk biskuit yang diberikan seperti Regal, Biskuit, Roma, Roma Sari Gandum, Oreo. Pemberian bahan makanan ini bertujuan untuk meningkatkan status dan kondisi gizi balita sesuai dengan usianya.

Sedangkan, di nagari Sungai Antuan, pemerintah nagari menyediakan dana desa sebesar Rp 900.000 per tahun untuk 8 balita yang mengalami gizi buruk. Bahan makanan yang diberikan Pemerintah Nagari berupa susu kepada orang tua yang anak-anaknya terkena stunting. Tujuan dari pemberian susu ini juga sama, yaitu untuk meningkatkan status dan kondisi gizi balita sesuai dengan usianya. Namun demikian, implementasi program ini belum berhasil menurunkan prevalensi stunting di daerah ini.

Mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) tentang implementasi kebijakan, menyatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan erat dengan implementor yang terlibat mengembangkan program-program dalam tindakan tertentu setelah kebijakan ditetapkan. Maka implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Mungka dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Nagari mengembangkan sejumlah alternatif program yang dapat mencegah prevalensi stunting. Pengembangan sejumlah alternatif kebijakan ini adalah berkaitan dengan program-program yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu Perbup No. 5 Tahun 2020.

Secara aktual, implementasi kebijakan pencegahan stunting di Nagari Mungka dan Sungai Antuan di Kecamatan Mungka telah dilaksanakan sesuai dengan Perbup No. 5 Tahun 2020. Namun demikian, kedua Nagari ini belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan program-program yang berdasarkan inisiatif sendiri sesuai dengan kondisi Nagari. Pemerintah Nagari lebih banyak melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, menyediakan sejumlah anggaran untuk membiayai kegiatan tertentu. Kedua Nagari tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal ini. Tidak ada agenda spesifik dari pemerintah nagari untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tujuan kegiatan selain hanya memfasilitasi penyediaan anggaran. Faktor inilah yang menyebabkan masih sulitnya pemerintah nagari menurunkan prevalensi stunting.

Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor kesesuaian implementasi dengan standar dan sasaran kebijakan. Hal ini,

mengindikasikan implementasi kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbup No. 25 tahun 2020 telah menetapkan program-program pencegahan stunting dan sasaran kebijakan. Jika dilihat lebih jauh, Pemerintah Nagari Mungka dan Sungai Antuan telah melaksanakan sesuai dengan Perbup. Demikian juga, sejumlah balita yang mengalami gizi buruk telah mendapatkan program tertentu. Namun demikian, implementasinya belum berhasil mewujudkan tujuan kebijakan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Pertama, implementasi belum didukung oleh sumber daya kebijakan yang memadai. Dari aspek sumber daya manusia, terutama pemerintah nagari dan Bamus belum memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung keberlanjutan program.

Kemudian dari sumber daya keuangan yang terbatas juga belum mampu mendukung pelaksanaan program pencegahan stunting. Masih banyak balita yang mengalami gizi buruk belum memperoleh PMT.

Kedua, dukungan ibu hamil dan ibu memiliki balita terhadap pencapaian tujuan program masih rendah. Rendahnya dukungan ini terlihat dari kesediaan mereka mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan stunting, memeriksakan kesehatan Ibu hamil dan balita di posyandu. Bahkan masih ditemukan ibu hamil dan ibu memiliki balita malu memeriksakan kesehatannya. Faktor inilah yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pencegahan stunting di Nagari Mungka dan Sungai Antuan.

Ketiga, hubungan antara wali nagari dengan tenaga pelaksana program pencegahan stunting belum terorganisir. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) hubungan antar organisasi pelaksana kebijakan sangat menentukan tingkat kerjasama dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Di Nagari Mungka dan Sungai Antuan, implementasi kebijakan pencegahan stunting belum didukung oleh kerjasama yang kuat antara pemerintah nagari dengan tenaga pelaksana program. Pelaksanaan program lebih banyak dilakukan bidan dan kader, sedangkan pemerintah nagari hanya menyediakan anggaran. Sehingga konvergensi kebijakan pencegahan stunting belum berhasil diwujudkan. Pemerintah nagari juga tidak banyak mengetahui tingkat capaian program dan kebutuhan ibu hamil dan anak balita dalam pencegahan stunting. Faktor inilah yang menyebabkan prevalensi stunting di Kecamatan Mungka belum berhasil dilaksanakan.

PENUTUP

Implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Mungka khususnya di Nahari Mungka dan Nagari Sungai Antuan telah dilaksanakan dalam beberapa program. Namun demikian, Implementasinya belum berhasil menurunkan stunting. Hal ini, menjadikan ke dua Nagari ini sebagai penyumbang prevalensi stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan stunting, pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan kemampuan pemerintah nagari. Tidak hanya sebagai penyedia anggaran tetapi juga diberikan kewenangan untuk mengevaluasi kualitas program sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Donal Van Meter and Carl Van Horn, 1975. *Models in Policy Implementation*, Yogyakarta Kartasmita, G. (1997). *Development for the People Facilitates Growth and Equity*, Jakarta. PT Pustaka Cidesindo.
- Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2011, *Guidelines for Providing Supplemental Food for Recovery for Undernourished Toddlers*, Jakarta, Director General of Maternal and Child Health Nutrition Development.
- Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2017, 'NUTRITION, Investing in the Future of the Nation', *Warta Kemasma*, pp 1-27.
- Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2017, *Technical Guidelines for Providing Supplemental Feeding*, Jakarta, Ministry of Health of the Republic of Indonesia.



- Kencana Syafie Inu. (2006) Public Administration Science, Jakarta: Rineka Cipta.
Fifty Cities Regent Regulation Number 25 of 2020.
Regulation of the Minister of Health Number 51 of 2018.
Presidential Regulation Number 42 of 2013 concerning the National Movement to Improve Nutrition Acceleration.
Sugiyono. (2014). Educational Research Methods Quantitative, Qualitative, and R&D Approaches. Bandung: Alfabeta
Law Number 36 of 2009 Concerning Health.
Law Number 6 of 2014 Concerning Villages.